

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dimensi Desa Pintar

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6 Tahun 2014). Sedangkan cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) (Web KBBI). Desa pintar atau *smart Village* merupakan suatu konsep desa pintar yang mengadopsi komponen-komponen atau indikator dari konsep kota pintar atau *smart city* namun dengan skala yang lebih kecil (wilayah desa atau kelurahan) dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya. Sebuah konsep desa pintar bisa dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan mengadopsi komponen kota pintar, maka bukan hal yang mustahil jika dari desa akan muncul kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM, sumber daya manusia yang unggul, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta lingkungan sosial yang baik.

Konsep desa pintar belum banyak dikemukakan dibandingkan dengan konsep kota pintar, demikian juga dengan dimensi untuk mengukur desa pintar. Maka dimensi pada desa pintar diadopsi dari kota pintar berikut merupakan variabel dalam kota pintar.

Berikut merupakan dimensi desa pintar yang diadopsi dari kota pintar :

Tabel II.1 Dimensi Desa Pintar

No	Dimensi Desa Cerdas	Variabel Dimensi Kota Cerdas	Indikator
1	<i>Smart Governance</i>	Partisipasi	Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan

		Transparansi	Keterbukaan Informasi
		Pelayanan Publik dan Sosial	Pemanfaatan TIK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
2	<i>Smart Economy</i>	Inovasi	1. Semangat inovasi 2. Kemampuan transformasi 3. Dana publik untuk pengembangan riset
		Kewirausahaan	1. Citra dan merk dagang 2. Produktivitas 3. Pasar tenaga kerja yang fleksibel 4. Keterkaitan multi-aktor
3	<i>Smart Mobility</i>	Lalu lintas	
		Transportasi public	Aksesibilitas lokal Sistem transportasi yang aman, inovatif, dan berkelanjutan
		Infrastruktur TIK	Ketersediaan infrastruktur TIK
4	<i>Smart Environment</i>	Efisiensi energi	1. Kondisi alam 2. Pengendalian pencemaran
		Pemantauan Jaringan dan Lingkungan	1. Perlindungan lingkungan 2. Pengelolaan sumber daya berkelanjutan
5	<i>Smart People</i>	Edukasi digital	1. Penguasaan digital 2. Keterbukaan
		Kreativitas	1. Fleksibel 2. Keinginan untuk terus belajar dan berkembang 3. Pluralitas etnik dan sosial 4. Partisipasi dalam kehidupan bersama
6	<i>Smart Living</i>	Kesehatan dan keamanan	1. Keamanan individu 2. Kualitas pemukiman 3. Kondisi kesehatan Fasilitas Pendidikan
		Akses Teknologi	
7	<i>Smart tourism</i>	Fasilitas dan atraksi wisata	1. Atraksi 2. Interaksi wisata 3. Ekonomi smart tourism

Sumber : Purwanto dan Permadi, 2019

Dapat dilihat pada tabel bahwa desa pintar dapat mencakup semua dimensi atau menerapkan salah satu dimensi seperti tabel diatas.

a. *Smart Governance*

Di dalam *Smart Governance*, pelayanan publik dilakukan secara terpusat, sistem pelayanannya sudah terintegrasi. Dampaknya adalah sistem dalam *Smart Governanct* dapat menopang dan menjamin kemudahan akses layanan

secara efektif. *Smart Governance* berupaya untuk mengupayakan adanya transparansi publik dimana masyarakat dapat melakukan pengawasan dan partisipasi langsung dalam membangun dilevel desa.

b. *Smart Economy*

Smart Economy merupakan pendekatan pemecahan masalah ekonomi daerah dengan membuka akses informasi yang luas sehingga meningkatkan peluang warga untuk melakukan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien dengan mereduksi biaya operasional lebih minimal, lebih produktif, dan tumbuh dalam konteks berkelanjutan. Smart economy berfokus pada elektronifikasi yaitu mengubah transaksi manual menjadi elektronik agar tidak adanya Batasan fisik lagi dalam bertransaksi, dan juga mengembangkan atau mempermudah pemasaran barang maupun jasa dalam lingkup wilayah agar dapat menembus pasar yang lebih besar lagi.

c. *Smart Mobility*

Smart mobility dapat diartikan sebagai sebuah kota dengan sistem pergerakan yang memungkinkan pencapaian tujuan dengan pergerakan yang sesedikit mungkin, hambatan serendah mungkin dan waktu tempuh sesingkat mungkin. "*Smart mobility*" harus memiliki empat indikator seperti aksesibilitas lokal, aksesibilitas nasional atau internasional, ketersediaan infrastruktur TIK, dan sistem transportasi yang aman, inovatif dan berkelanjutan. Smart mobility menjadi bagian penting dalam menjawab perkembangan zaman karena dapat memberikan kemudahan akses bagi warga dalam mendapatkan pelayanan system transportasi yang cepat, inovatif dan kreatif.

d. *Smart Environment*

Smart environment mengeksplorasi ide lingkungan secara cerdas, di mana informasi dan layanan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Smart environment merupakan peran lingkungan yang ditopang dengan adanya teknologi yang berkembang secara cepat yang dapat memberikan desa infrastruktur yang memadai seperti jembatan, jalan, saluran listrik dan pembuangan limbah serta jalur komunikasi.

e. *Smart People*

Desa pintar sangat diharapkan untuk menawarkan program dan layanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan modal sosialnya. *Smart People* adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama dan memiliki budaya yang relatif sama yang dapat memahami tentang manfaat dan kegunaan sarana infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah di lingkungannya masing-masing.

Masyarakat juga dituntut untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kota, serta menjadi pengguna kota yang aktif. Masyarakat juga adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan terciptanya kota pintar.

f. *Smart Living*

Smart living berkaitan dengan kualitas hidup manusia, seperti kondisi permukiman, kondisi kesehatan dan Pendidikan serta interaksi social. Smart living dapat membantu masyarakat untuk hidup lebih berkualitas.

g. *Smart Tourism*

Smart Tourism dapat dilihat sebagai perkembangan logis dari pariwisata tradisional ke arah e-pariwisata di bahwa dasar untuk inovasi dan orientasi teknologi industri dan wisatawan menjadi fokus dengan adopsi luas informasi dan komunikasi teknologi (ICT) di bidang pariwisata. Tujuan informasi wisata pintar sebagai tujuan wisata yang inovatif, dibangun di atas infrastruktur teknologi canggih menjamin pembangunan berkelanjutan dari kawasan wisata, diakses oleh semua orang, yang memfasilitasi interaksi pengunjung dengan dan integrasi ke dalam lingkungan nya, meningkatkan kualitas pengalaman di tempat tujuan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk

2.2 Perbedaan Konseptual Kota Pintar dan Desa Pintar

Apabila dilihat dalam konteks karakter pembangunan, desa memiliki pola pembangunan yang berbeda dengan kota. Desa merupakan kesatuan unit dari suatu

entitas masyarakat yang memiliki karakter dan tradisi yang khas di mana masyarakatnya menjadi bagian terdepan dan penggerak utama pembangunan sehingga desa diasosiasikan sebagai kesatuan masyarakat hukum (Rauf, 2016). Desa juga merupakan kesatuan homogenitas masyarakat yang sederhana dengan mata pencaharian homogen (Salim; Munir, 2015). Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang homogen tidak bisa disamakan dengan kota dalam adopsi teknologi informasi. Konsep kota pintar tidak bisa diterapkan di desa dengan mengungus terminologi desa pintar karena homogenitas masyarakatnya serta lokalitas karakteristik dan budaya. Perlu ada upaya konstruksi konseptual yang didasarkan kepada karakteristik desa. Dari pemahaman tersebut, maka adanya pemanfaatan teknologi informasi di desa ditujukan untuk penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan, kelestarian tatanan sosial dan struktur masyarakat perdesaan sebagai sebuah kesatuan hukum yang khas.

Tabel II.2 Perbedaan Konseptual Kota Pintar Dan Desa Pintar

Aspek	Kota Pintar	Desa Pintar
Pendekatan	Top-Down	Bottom-UP
Posisi Pemerintah	Regulator	Fasilitator
Posisi Masyarakat	End-User	Customer
Proses Pengembangan	Kolektivitas dan integrasi elemen dasar kota pintar	Penguatan, kesadaran dan partisipasi terhadap elemen desa pintar
Prioritas Sasaran	Masyarakat dengan mobilitas tinggi	Masyarakat menengah, miskin dan belum terberdayakan
Prasyarat Keberhasilan	Pendekatan teknologi menjadi basis utama di mana setiap pihak didorong untuk menggunakan teknologi informasi sebagai dasar keberhasilan kota pintar	Pendekatan sosial-kultural menjadi basis utama. Adanya identifikasi yang valid terhadap berbagai nilai, karakter, norma dan masalah yang ada di masyarakat menjadi dasar keberhasilan desa pintar
Tujuan	Terwujudnya teknologi informasi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, kemudahan akses informasi dan layanan dasar, sehingga menciptakan peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan	Terwujudnya pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi informasi

Sumber : Herdiana, 2019

Berbeda dengan pengembangan kota pintar, pengembangan desa pintar harus dipahami sebagai kondisi yang menunjukkan adanya dorongan dari bawah, yaitu dari masyarakat untuk lebih bisa menggali potensi dan meningkatkan kapasitas yang dimilikinya. Keinginan tersebut kemudian didorong oleh pemerintah desa sebagai cara untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan agar terwujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai alat dalam upayanya mewujudkan keinginan tersebut dan bukan sebagai tujuan. Dari pemahaman tersebut, maka pengembangan desa pintar didasarkan kepada pendekatan dari bawah “bottom-up” atas prakarsa dan keinginan masyarakat, sehingga adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator. Dengan begitu, maka sasaran masyarakat yang dituju jelas merupakan kategori masyarakat menengah, miskin dan belum terberdayakan, sehingga pengembangan teknologi informasi mampu mendorong kelompok masyarakat tersebut mencapai peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup (Herdiana, 2019).

Pengembangan desa pintar dalam prosesnya memerlukan analisis tentang berbagai nilai, karakter dan norma yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi penting karena masyarakat ditempatkan sebagai customer dari teknologi informasi. Masyarakat diberikan prioritas mengenai potensi dan karakter mana yang ingin dikembangkan dan dilembagakan melalui dukungan teknologi informasi, sehingga akan tercipta pemanfaatan teknologi yang tepat guna didasarkan kepada kebutuhan dan karakter masyarakat dalam kerangka desa pintar.

2.3 Pembangunan Desa Melalui UU Desa dalam Pengembangan Desa Cerdas

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (UU No 6 tahun 2014). Desa harus dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta keadilan sosial. Pembangunan desa telah dirumuskan dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa dimana undang-undang ini secara garis besar UU Desa menegaskan tentang kemandirian Desa dan independensi Desa dalam mengelola sumber daya dan sumber dana Desa. Jika dijabarkan lagi Desa sebagai wilayah otonom dalam UU No 6 tahun 2014 mempunyai eksklusifitas antara lain dalam hal kewenangan mengelola keuangan Desa secara mandiri, kewenangan membuat peraturan Desa, dan kewenangan membuat BUMDes, berikut merupakan asal kewenangan desa :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan desa dalam uu desa ini memiliki beberapa program prioritas untuk dikembangkan, namun tujuan pembangunan desa dalam uu desa ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; dan
3. Penanggulangan kemiskinan.

Adapun program prioritas pembangunan desa meliputi :

1. Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan;
3. Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala Produktif;
4. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan
5. Peningkatan Kualitas Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam UU Desa dijelaskan tentang pendapat desa yang dijelaskan dalam pasal 72 Ayat UU Desa dimana berisi

1. Pendapatan Asli Desa: hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan desa;
2. Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
3. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
4. Bantuan dari APBD Provinsi/Kota kabupaten;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; dan
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Lalu dana desa memiliki beberapa prioritas yang tercantum dalam Permen PDDT No 16 tahun 2018. Dimana prioritas ini diharapkan agar desa memiliki arah pandang mengenai pemanfaatan dana desa. Berikut merupakan beberapa prioritas dana desa :

1. Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang;
3. Peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa; dan
4. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Selanjutnya tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengembangkan desa pintar. Pengembangan desa pintar dapat memungkinkan desa dapat mengetahui permasalahan yang sedang dialaminya dan mengatur berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Desa pintar menjadi pilihan dari pengembangan untuk mencapai tujuan dari dana desa, dimana desa pintar dapat memberi pilihan yang banyak dalam pembangunan desa. Pembangunan desa menjadi sangat krusial dimana perlunya transparansi, dimana pada

wilayah desa terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang cukup pelik dan berbeda-beda. Pengembangan desa sebagai desa pintar juga sesuai dengan Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.

2.4 Persepsi Masyarakat dan Pemerintah Desa

Persepsi adalah kegiatan berupa mengenali, menginterpretasi dan menyusun informasi dalam rangka memahami atau merepresentasikan lingkungannya pembentukan persepsi melibatkan indra manusia seperti penciuman, sentuhan, pendengaran dan penglihatan. Namun persepsi itu sendiri tidak berupa penerimaan pasif dari signal-signal indra melainkan dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, ekspektasi dan perhatian (Gregory, 1987 dalam Ardianto, 2006).

Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang integrateed, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito dalam Adrianto, 2006). Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal: perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah : stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.

Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut society asal katanya socius yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus, bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sedangkan jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial. Sehingga para pakar sosiologi seperti Mac Iver, J.L Gillin memberikan pengertian bahwa masyarakat adalah

kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama (Musadun dalam Adrianto, 2006). Sedangkan pemerintah desa menurut UU No 06 tahun 2014 tentang desa dijelaskan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut maka persepsi masyarakat dan pemerintah merupakan rangkaian proses pengenalan, penilaian atau aktifitas evaluasi emosional terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan tersebut dengan menggunakan media pendengaran, pengelihatian, peraba dan sebagainya.

2.5 Masyarakat dan Pemerintah Desa Sebagai Stakeholder dalam Pengembangan Desa Pintar

Desa pintar merupakan sebuah inovasi program yang melibatkan banyak pihak dalam proses perencanaan, pengembangan maupun saat pelaksanaan. Masyarakat desa dan pemerintah desa merupakan pihak yang langsung terlibat dengan memegang peran penting. Menurut McGlynn (2018) peran masyarakat desa sebagai akselerator pembangunan desa pintar, dimana masyarakat memiliki inisiatif untuk mengeksplorasi solusi dari tantangan yang dihadapi agar dapat memiliki peluang baru. Peran serta masyarakat dalam pengembangan desa pintar dapat membuat kesetaraan sosial antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Penggunaan teknologi yang diterapkan dalam desa pintar tidak akan memiliki peran yang efektif jika masyarakat tidak menggunakan teknologi tersebut secara maksimal. Masyarakat memiliki peran sebagai agen inovasi, agar inovasi yang terjadi pada desa dapat mengerti tentang keinginan masyarakat dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi yang ada. Selain sebagai akselerator pengembangan desa cerdas masyarakat juga memiliki peran sebagai pengawas dari jalannya pemerintahan desa. Karena desa pintar ini memberi sebuah ruang agar pemerintah desa dapat transparan dan akuntabilitas dalam jalannya sebuah kerja pemerintah. Pengembangan teknologi dalam desa pintar mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap perencanaan pembangunan desa. Maka

mekanisme pengambilan keputusan desa pintar diharapkan dapat bersifat bottom-up tidak lagi top-down.

Sedangkan peran pemerintah menurut Baru, dkk (2019) merupakan aktor utama sebagai penggerak program desa pintar. Desa pintar memerlukan sebuah terobosan yang luar biasa dalam pengembangannya. Untung mendukung ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan dalam desa pintar. Menurut Santoso, dkk (2019) ada 4 faktor yang mempengaruhi pengembangan desa pintar, faktor tersebut antara lain:

a. Kepemimpinan

Dalam UU Desa, kepala desa memiliki tugas penting yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dalam pembangunan desa berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara lebih detail, kepala desa berperan dalam mendorong adanya interaksi masyarakat dan berkoordinasi dengan berbagai institusi.

b. Modal Sosial

Modal sosial merupakan faktor yang dibutuhkan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengandalkan pemerintah (Seftyono dkk., 2018 dalam Santoso 2019). Oleh sebab itu, modal sosial menjadi alternatif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena masyarakat di Indonesia sangatlah komunal dan memiliki berbagai macam nilai yang mendukung pembangunan desa.

c. Dana Desa

Dana desa merupakan dana realokasi anggaran pusat berbasis desa yang diberikan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dana desa memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa memerlukan alokasi anggaran dari pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

d. Partisipasi Masyarakat

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat (Marcus & Asmorowati, 2006 dalam santoso, dkk 2019). Untuk itu, pemerintah desa perlu mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan desa pintar.

2.6 Konsep Desa Pintar

Viswanadham dan Vedula dalam sebuah papernya yang cukup populer, *Design of Smart Village* (2010), mendefinisikan desa pintar sebagai seperangkat layanan yang diberikan kepada masyarakat dan kelompok swasta dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Smart vilage bukan hanya berfokus pada optimalisasi penggunaan perangkat IT saja, namun juga fokus pada penguatan human investment dan modal sosial masyarakat di samping pemenuhan investasi fisik (infrastruktur) desa. Konsep desa pintar dibutuhkan agar desa-desa mampu mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya, memahami kondisi permasalahan tersebut dan dapat mengatur berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien. Beberapa konsep lain menyimpulkan desa pintar merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah (khususnya perdesaan) sebagai sebuah interaksi yang kompleks diantara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Berdasarkan kosep ini, pengertian desa pintar lebih ditekankan kepada penerapan suatu teknologi pada salah satu aspek yang ada di desa tersebut (Lembaga Administrasi Negara, 2018).

Secara umum konsep desa pintar mengintegrasikan beberapa aspek seperti infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien sehingga membuat desa tersebut menjadi desa yang layak huni serta pemerintah desa dapat mengoptimalkan agar dapat mengelola sumberdayanya secara efektif dan efesien dan sustainable. Konsep desa pintar yang ditawarkan Viswanadham tersebut berpijak pada sebuah kerangka pikir ekosistem desa. Ekosistem Desa pintar yang dimaksud terdiri dari jaringan UKM, petani,

karyawan; pemerintah daerah, daerah dan pusat; industri lainnya, sosial dan organisasi politik; infrastruktur, logistik dan teknologi informasi; dan sumber daya alam, finansial dan sumber daya manusia terampil dengan koneksi, pengetahuan tentang lingkungan industri, berinteraksi bersama dengan lanskap (ruang atau domain) dan iklim untuk menyediakan layanan bagi sebuah desa.

Selanjutnya dalam tulisan Lembaga Administrasi Negara yang berjudul “Pengembangan Model Desa Cerdas” dirumuskan konsep-konsep operasional aspek dalam desa cerdas dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel II.3 Konsep Operasional Desa Cerdas

Aspek	Indikator	Program Desa
Smart Government	Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	E-governmant
	Kapasitas kelembagaan desa	Website Desa
	kapasitas aparatur desa	
Smart People	Revitalisasi lembaga sosial desa	LPM Desa Hanura
	Keswadayaan masyarakat	
	Pemberdayaan perempuan	PKK Desa Hanura
Smart Ecomony	Revitalisasi kelembagaan ekonomi desa	BUMDes, UMKM dan Gapoktan
	Kesetaraan akses atas sumber daya ekonomi desa	
	Kebermanfaatan Bersama	
	Keberlanjutan	
Smart Environment	Kelestarian lingkungan	Taman ramah anak dan Wifi Gratis
	Kapasitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Program TMS
Smart Tourism	Kapasitas lembaga promosi	Sosial Media
	Penyelenggaraan branding destinasi wisata	Hanura Festival Carnaval

Sumber : Lembaga Administrasi Negara, 2018

Tabel diatas menjelaskan komponen dari berbagai aspek yang dijadikan rumusan sebagai komponen konsep dasar dari desa cerdas. Hubungan antara indikator dan program Desa Hanura yang memiliki beberapa representatif dari indikator yang dituliskan dalam tulisan diatas. Dimana indikator ini dijadikan sebuah acuan dalam merumuskan konsep desa cerdas. Namun tidak menutup kemungkinan akan muncul

beberapa indikator baru yang sebelumnya tidak dirumuskan pada tabel diatas. Program desa merupakan suatu kebutuhan desa untuk dapat mewujudkan beberapa aspek dari desa cerdas, dibutuhkan beberapa program yang terintegrasi untuk dapat mewujudkan konsep dari desa cerdas tersebut.

Beberapa indikator dalam desa cerdas menurut Lembaga Administrasi Negara yakni :

1. Tata kelola pemerintahan yang menekankan pada kapasitas aparatur desa, kapasitas kelembagaan desa, dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan dasar yang memadai.
2. Masyarakat yang mampu mengoptimalkan modal sosial yang dimilikinya untuk mendayagunakan dan memperkuat lembaga sosial desa, semangat keswadayaan, dan pemberdayaan kelompok perempuan dan kelompok marjinal lainnya.
3. Tata kelola ekonomi desa yang ditopang oleh kelembagaan ekonomi yang kuat dan kesetaraan akses atas sumber daya ekonomi desa, berorientasi pada kebermanfaatan yang dinikmati bersama dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan.
4. Tata kelola lingkungan alam (air, udara, lahan) desa yang mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian dan daya tanggap terhadap pencegahan dan penanggulangan risiko bencana.

2.7 Kisi-Kisi Teoritik

Kisi kisi teoritik merupakan rangkuman dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan pada penelitian ini mendefinisikan bahwa desa pintar merupakan daerah dan masyarakat pedesaan yang dibangun diatas kekuatan dan asset mereka sendiri serta pada saat yang sama terdapat usaha untuk mengembangkan peluang baru dimana jaringan baik tradisional maupun baru dan pelayanan ditingkatkan melalui teknologi digital, telekomunikasi, inovasi dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik. Desa pintar terdiri dari masyarakat pedesaan yang berinisiatif mengeksplorasi solusi praktis mengenai tantangan mendasar yang dihadapi agar dapat menghadapi peluang baru.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dan Pemerintah Desa Hanura mengenai desa pintar yang akan diterapkan di Desa Hanura dan perbedaan antara masyarakat desa dan pemerintah desa mengenai persepsi tersebut. Persepsi sendiri merupakan mengenali dan menginterpretasi informasi dalam rangka memahami lingkungannya melalui indera yang dimilikinya. Faktor yang mempengaruhi persepsi antar lain faktor internal: perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Sedangkan persepsi masyarakat dan Pemerintah Desa Hanura mengenai desa pintar pada penelitian ini dipengaruhi oleh proses dan tingkat pemahaman mereka mengenai desa pintar.

